

BAB I

PENDAHULUAN

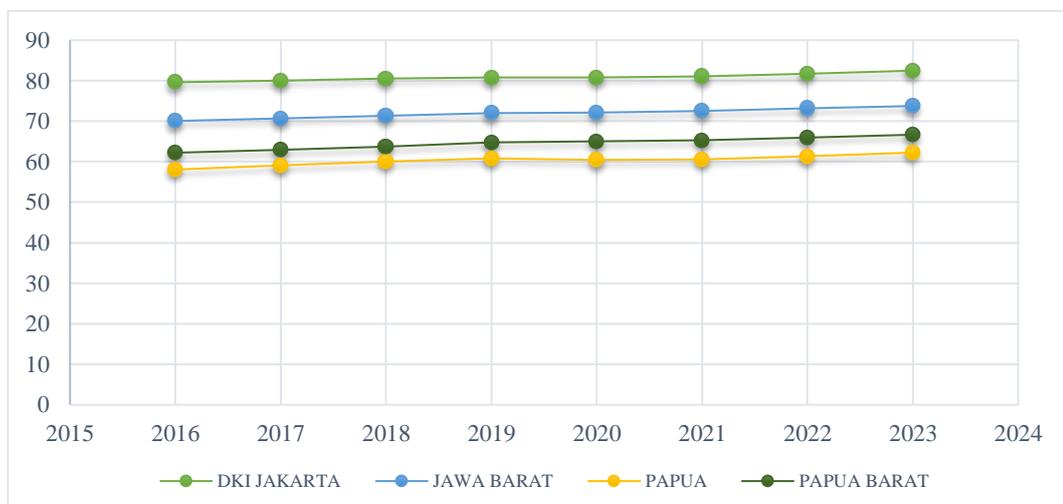
1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur. Sebuah pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan pembangunan manusia dimana pembangunan manusia merupakan suatu dasar dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Pembangunan manusia ialah rumusan sebuah pilihan bakal penduduk, yang dapat digambarkan dalam sebuah proses usaha ke arah perluasan pilihan dan sebagai gambaran pencapaian taraf hidup manusia yang dicapai (UNDP dalam Kusumaningrum 2021). Secara tradisional, pembangunan adalah kemampuan suatu perekonomian untuk memiliki situasi ekonomi dasar yang kurang lebih stabil dalam jangka waktu yang lama, yang mengarah pada peningkatan pendapatan nasional atau GNI (pendapatan nasional bruto) tahunan (Todaro dalam Kusumaningrum 2021). Pembangunan nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak rencana kebijakan pemerintah yang dikaitkan oleh perbaikan keadaan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi dari *United Nations Development Programme* (UNDP).

Selanjutnya dalam Kusumaningrum (2021) menyatakan tolak ukur untuk melihat kesejahteraan hidup manusia adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). IPM dapat diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Zarkasi &

Prangga (2021) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan dari nilai besarnya IPM. IPM berkisar antara 0-100 dengan rincian IPM yang lebih kecil dari 50 maka masuk kategori rendah, IPM dari 50-80 termasuk kategori sedang, dan IPM lebih dari 80 ke atas termasuk kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di tingkat dunia pada tahun 2023 menempati peringkat ke 130 dari 199 negara menurut analisis dari *The World Bank* yang dipaparkan oleh kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Meskipun nilai IPM Indonesia sendiri tergolong tinggi dan terus meningkat, namun ketimpangan kualitas manusia masih terjadi, kesenjangan antar wilayah akan mempengaruhi capaian IPM secara keseluruhan. Jika provinsi dengan nilai IPM rendah tidak didorong untuk mempercepat peningkatan kualitas manusia melalui sejumlah indikator yang diukur dalam IPM, maka capaian daerah lain yang tinggi jadi kurang bermakna.



Gambar 1. 1 IPM di Indonesia Tahun 2016-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Data BPS menunjukkan, dua provinsi dengan IPM tertinggi selalu diduduki oleh DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain karena Jakarta merupakan ibu kota negara dan pusat pemerintahan, bisnis dan kebudayaan. Jakarta dan Jawa Barat juga memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan serta tingkat pengangguran yang lebih rendah. Sementara dua provinsi terbawah ditempati bergantian, antara Papua, dan Papua Barat. Dua provinsi tersebut masih terdapat kendala dalam akses pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya tingkat perekonomian, infrastruktur yang masih terbatas pun mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut. Pada tahun 2023 IPM tertinggi dicapai DKI Jakarta hingga nilai tertingginya mencapai 82.46, sedangkan IPM terendah dicapai oleh Papua yang nilainya 62.25 hingga selisihnya sebesar 20.21 poin. Daerah dengan IPM rendah sebenarnya tetap tumbuh, namun pertumbuhannya tidak mampu menyaingi daerah yang IPM-nya sudah tinggi yang juga terus meningkat.

Peningkatan indeks pembangunan manusia sejalan dengan perolehan upah minimum yang semakin meningkat sehingga kebutuhan dasar seseorang akan terpenuhi (paritas daya beli). Dalam (Kiha et al., 2021) tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan upah minimum, bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan kesejahteraan manusia. Meskipun bukan merupakan alasan yang utama, upah minimum berpengaruh terhadap kelompok tertentu dengan tingkat pengangguran yang tinggi, penetapan tingkat upah yang telah dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya suatu tingkat

pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran nilai dari upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka hal ini akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Upah atau biasa juga disebut dengan balas karya tenaga kerja mempunyai dua sisi yang penting, untuk pihak produsen upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin, namun untuk pihak dari pekerja upah merupakan sumber penghasilan untuk dirinya serta keluarganya, dan juga menjadi sumber pembelanjaan untuk masyarakat. Tinggi atau rendahnya tingkat upah bersangkutan dengan pribadi manusia, harga diri, serta status dalam masyarakat, dan merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat.



Gambar 1. 2 Tingkat Upah di Indonesia Tahun 2016-2023

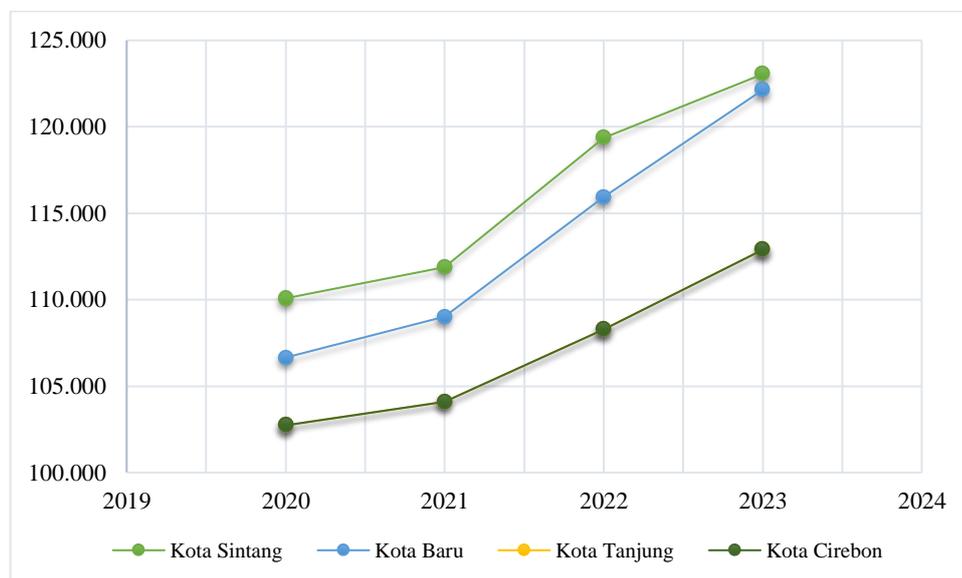
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dalam gambar 1.2 menunjukkan ketimpangan upah yang terjadi di Indonesia, DKI Jakarta dan Papua menempati posisi tertinggi dengan upah minimum paling tinggi, sedangkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki tingkat upah terendah.

Penetapan upah minimum di setiap provinsi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kebutuhan hidup layak, di Jakarta yang merupakan ibu kota dengan padat penduduk dan banyak lapangan pekerjaan yang bisa menyebabkan persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja, berbanding terbalik dengan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang tidak tersedia banyak lapangan pekerjaan serta standar hidup layaknya pun tidak tinggi. Kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pada pasar tenaga kerja, upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia, implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif dalam Sulistiawati (2012). Peningkatan tingkat upah dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup masyarakat karena mengarah pada peningkatan tingkat konsumsi, serta dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan pendapatan yang cukup bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun sebaliknya, dampak tingkat upah terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu sederhana, keputusan perusahaan untuk menaikkan upah dapat memiliki dampak seperti potensi penurunan tingkat pekerjaan atau kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang baik antara upah yang adil dan keberlanjutan ekonomi.

Disamping itu, inflasi juga dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Bank Indonesia (2020) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok rumah tangga secara terus menerus. Data kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini dicatat oleh Badan Pusat Statistika (BPS), indikator inflasi ini

dibuat oleh para ahli yang disebut dengan indeks harga konsumen (IHK). Tingkat inflasi yang terjadi disuatu Negara atau daerah merupakan suatu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu Negara atau daerah, sehingga pemerintah atau penyelenggara Negara/daerah harus menjalankan kebijakan yang tepat dan mengawasi laju inflasi. Dalam perekonomian dimanapun di dunia ini tidak bisa dihindari inflasi, akan tetapi yang perlu diperhatikan tingkat inflasi jangan terjadi terus-menerus dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Terjadinya inflasi, juga akan memberikan efek dua arah, yaitu efek mempersulit keadaan ekonomi masyarakat, dan di sisi yang lain akan memberikan efek memperbaiki keadaan ekonomi sebagian masyarakat.



Gambar 1. 3 Indeks Harga Konsumen di Indonesia Tahun 2020-2023

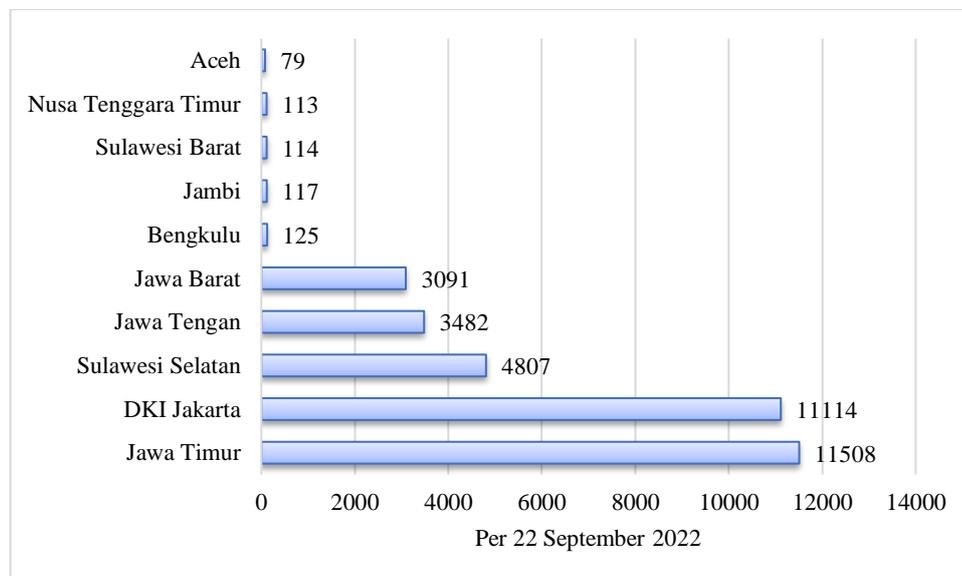
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari gambar 1.3 kota Sintang dan Kota Baru memiliki indeks harga konsumen yang tinggi, seperti pada tahun 2023 IHK kota Sintang meningkat dari 119.367 menjadi 123.047 yang artinya naik 3.08% dari tahun sebelumnya,

peningkatan harga barang dan jasa yang dipengaruhi banyak faktor, seperti permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Sedangkan untuk kota Tanjung dan Kota Cirebon memiliki nilai indeks harga konsumen yang rendah di Indonesia, pada tahun 2023 IHK Kota Tanjung sebesar 111.798 naik sebesar 2.74% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk kota Cirebon memiliki nilai IHK sebesar 112.889 naik sebesar 4.24% dari tahun sebelumnya. Indeks harga konsumen menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu, IHK merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat pergerakan naik/turunnya harga secara umum. Sehingga indeks ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan harga barang dan jasa di pasar secara riil. Harga konsumen disini mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, diantaranya meliputi kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, keterkaitan inflasi dengan tingkat kesejahteraan terjadi karena akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian barang-barang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Sehingga tingkat kesejahteraan menjadi terganggu karena daya beli masyarakat menurun.

Badan pusat statistik menyebutkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks pembangunan manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Tentunya faktor kesehatan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesehatan

yang optimal berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, masyarakat cenderung merasa lebih bahagia karena memiliki energi yang lebih banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang lebih produktif, sedangkan jika masyarakat yang mengalami kesehatan menurun dapat mempengaruhi seluruh aktivitas termasuk aktivitas perekonomian. Seperti yang terjadi di tahun 2020, saat pandemi melanda dunia dan tidak terkecuali Indonesia pun terdampak.



Gambar 1. 4 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia

Sumber: Dashboard Covid-19 (kemkes.go.id)

Dari gambar 1.4 terdapat provinsi yang memiliki kasus terkonfirmasi covid-19 tertinggi dan terendah, Jawa Timur dan DKI Jakarta menjadi provinsi yang penyebarannya tinggi karena padatnya penduduk yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang tinggi dan menjadi pintu akses keluar masuknya turis ke dalam negeri, masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan juga sangat

mempengaruhi cepat lambatnya penyebaran covid-19, seperti masyarakat Aceh yang taat pada aturan ataupun kebijakan yang berlaku sehingga dapat mencegah penyebaran virus. Pandemi COVID-19, yang dimulai pada tahun 2019, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara global. Gorahe et al., (2021) menjelaskan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4-2,3% menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%. Indonesia tidak luput dari dampaknya, termasuk penurunan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi. Upaya pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan kebijakan jaring pengaman sosial menjadi kunci dalam merespon dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, secara umum kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dinilai melalui nilai IPM (indeks pembangunan manusia) mengalami peningkatan sebesar 0,2%-3,5% pada tahun 2001-2023. Variabel yang baru dalam penelitian ini (*research gap*), yaitu variabel covid-19 yang masih jarang diteliti pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi pandemi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan nilai IPM hanya bertumbuh sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Tingkat upah, Indeks Harga Konsumen, dan Covid-19 terhadap Kesejahteraan Indonesia pada Tahun 2001-2023”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat upah, indeks harga konsumen, dan covid-19 secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2001-2023;
2. Bagaimana pengaruh tingkat upah, indeks harga konsumen, dan covid-19 secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2001-2023;

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah, indeks harga konsumen, dan covid-19 secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2001-2023;
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah, indeks harga konsumen, dan covid-19 secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2001-2023;

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan adanya variabel covid-19, yaitu pandemi yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia sendiri diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan

masyarakat, dengan menggunakan *range* waktu 23 tahun diharapkan pula membantu sebagai pertimbangan dalam memahami dan menentukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, serta guna melatih kemampuan dalam memahami dan menganalisis masalah.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan data terkait faktor-faktor serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan pengambilan data dari situs web Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan serta beberapa sumber media *online* yang relevan dan terpercaya.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2023/2024, dimulai sejak bulan Desember 2023 dengan pengajuan judul kepada

pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan, penulis memperkirakan penelitian ini selesai sampai bulan Juni 2024 dengan estimasi sebagai berikut:

